

**ANALISIS KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



NAMA : NANI SEKAR WAHYUNI
NPM : 1605170228
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, telah melaksanakan sidang sidang pengesahan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang dengan acuan, setelah mendengar, melihat, dan membicarakan dan memutuskan:

MEMUTUSKAN

Nama : **YANUSIAH SAHYANI**
NIM : **1902100000000000000**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Konsentrasi : **MANAJEMEN SUMBER MANUSIA**
Judul Skripsi : **ANALISIS KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan berhak melanjutkan pengesahan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. FIEZAH GITA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. NIAH SARI, S.E., M.Si)

Penyelia I

Ketua

(Dr. H. JAFURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NANI SEKAR WAHYUNI
N P M : 1605170228
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E, M.Si.,Ak.,CA


Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si




NURI, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NANI SEKAR WAHYUNI
N P M : 1605170228
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Assec. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E, M.Si.,Ak.,CA
Judul Skripsi : ANALISIS KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Menganalisis tantangan Value for money dalam meningkatkan Pemeliharaan 2. Menganalisis Indikator Value for money standar Program 3. Menganalisis keefektifan & Perencanaan	4 Januari 2022	
Bab 2	1. Menganalisis Pengujian penderapian atau daerah 2. Menganalisis ciri-ciri pajak daerah 3. Menganalisis bentuk-bentuk pajak daerah	21 Maret 2022	
Bab 3	1. Menganalisis Jenis penelitian 2. Menganalisis Jurnal dosen UMSU	26 April 2022	
Bab 4	1. PMSD ekonomis 2. PMSD Efisiensi 3. PMSD Efektifitas	15 September 2022	
Bab 5	1. Pembahasan	15 September 2022	
Daftar Pustaka	pl		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc. Sedy Hiy Hiy	24/9/2022	

Medan, September 2022

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E, M.Si.,Ak.,CA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **NANI SEKAR WAHYUNI**
NPM : 1605170228
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : **ANALISIS KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NANI SEKAR WAHYUNI

ABSTRAK

PERANAN *VALUE FOR MONEY* UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NANI SEKAR WAHYUNI

Program Studi Akuntansi

Email :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan konsep *value for money* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan menggunakan *value for money* untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak mencapainya target atas pendapatan Daerah Sumatera Utara, dan juga besarnya anggaran atas belanja daerah, selain itu juga disebabkan dari dampak Covid-19 yang menyerang Indonesia, sehingga berdampak dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah daerah. Untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pemerintah daerah, hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak Covid-19 yang berdampak dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah

Kata Kunci : Value For Money, Rasio Ekonomi, Efisien, Efektivitas dan Kinerja

ABSTRACT

THE ROLE OF VALUE FOR MONEY TO MEASURE THE PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF THE NORTH SUMATRA PROVINCE

NANI SEKAR WAHYUNI

Accounting Study Program

Email :

This study aims to determine and analyze the performance of local government as measured by the concept of value for money in the Provincial Government of North Sumatra, to determine the factors that cause the realization of regional income is still below the budget that has been set. This type of research is in the form of a descriptive approach, namely research conducted by collecting and presenting data received from the North Sumatra Provincial Government in the form of data on the amount of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the North Sumatra Province Government so as to provide a clear enough picture to analyze and compare with existing theories. The results of the study show that the performance of the Regional Government of North Sumatra Province as measured by value for money for 2015 to 2020 tends to decrease, this occurs due to not achieving the target for North Sumatra Regional income, and also the size of the budget for regional expenditures. caused by the impact of Covid-19 that attacked Indonesia, so that it had an impact on the level of economic growth of the regional government. For the level of realization of regional revenues of the Regional Government of North Sumatra Province for 2017 to 2020 it is still below the regional government budget, this is because the regional original income has decreased due to the impact of Covid-19 which has an impact on the level of economic growth which has also experienced a decline. decline. With the decrease in this ratio, it also shows that the Regional Government of North Sumatra Province can be said to have a poor performance in increasing regional income

Keywords: Value For Money, Economic Ratio, Efficient, Effectiveness and Performance

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Paiman dan Ibunda Suprihartati yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE, M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari SE, M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan melakukan riset kepada penulis.
9. Dan kepada teman seperjuangan dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, September 2022
Penulis

NANI SEKAR WAHYUNI
1605170228

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Keuangan Daerah	8
2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	8
2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	10
2.1.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	12
2.1.2 <i>Value For Money</i>	13
2.1.2.1 Pengertian <i>Value For Money</i>	13
2.1.2.2 Indikator <i>Value for Money</i>	14
2.1.2.3 Langkah-langkah pengukuran <i>Value for Money</i>	16

2.1.3	Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.3.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.3.2	Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
2.3	Kerangka Berpikir Konseptual.....	25
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Jenis Penelitian.....	28
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Teknik Analisa Data.....	32
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Deskripsi.....	34
4.1.2	Analisis Data.....	37
4.2	Pembahasan.....	44
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah	4
Tabel 2.1 Pengukuran Rasio Ekonomis	17
Tabel 2.2 Pengukuran Rasio Efisien	17
Tabel 2.3 Pengukuran Rasio Efektivitas	18
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara	31
Tabel 3.3 Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	32
Tabel 3.4 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi	32
Tabel 3.5 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas	33
Tabel 4.1 Pengukuran Rasio Ekonomis	38
Tabel 4.2 Pengukuran Rasio Efisien	40
Tabel 4.3 Pengukuran Rasio Efektivitas	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir27
Gambar 4.1 Rasio Ekonomis.....	..38
Gambar 4.2 Rasio Efisien40
Gambar 4.3 Rasio Efektivitas43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, daerah Kabupaten/Kota ada sebanyak 33 daerah. Daerah tersebut terbagi atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan turut berubah dari yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Daerah menjadi memiliki wewenang untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya, mendorong percepatan pembangunan dan investasi daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu lembaga atau organisasi. Keuangan pemerintah daerah dapat dikategorikan dalam dua yakni, keuangan yang bersumber dari penerimaan dana dari pemerintah pusat dan keuangan yang bersumber dari pengelolaan daerahnya sendiri. Dilakukannya analisis kinerja keuangan bagi pemerintah daerah merupakan hal yang cukup efektif untuk menilai kinerja pemerintah daerah dari sisi keuangan yang dikelolanya. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur melalui analisis rasio keuangan pemerintah daerah

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut (Halim, 2012) bahwa bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut (Bastian, 2013) pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2014)

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme dari sektor publik dapat dinilai dengan menggunakan konsep *value for money* dalam menjalankan segala aktivitasnya. Tujuan dari pengukuran kinerja dengan menggunakan *value for money* adalah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan

juga dapat memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang dapat diukur dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2014)

Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2014)

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Indonesia, 2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Pajak Daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan daerah (Halim, 2012)

Menurut (Sutedi, 2012) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena

mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pumungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah otonom yang kedudukan, fungsi dan peran yang cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Dimana di dalam laporan APBD Provinsi Sumatera Utara terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah
2015	8.452.310.815.631	8.480.758.952.970	7.959.167.183.686	8.442.940.440.715
2016	10.055.827.824.848	10.440.618.930.401	9.476.423.914.544	10.180.753.776.243
2017	12.417.425.444.814	12.234.837.881.539	10.489.397.363.653	11.434.893.977.763
2018	13.037.639.478.554	12.703.058.587.890	10.993.656.938.251	12.290.330.450.127
2019	14.034.339.344.970	13.081.482.296.509	13.527.855.950.251	14.726.662.153.406
2020	13.077.362.353.824	10.935.643.264.218	10.935.643.264.218	11.494.671.486.409

Sumber : Data diolah (2022)

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat ukur finansial dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu

komponen yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen pendapatan dan belanja daerah. Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan data realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pendapatan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara, bahkan jumlah pendapatan daerah ditahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara kurang mampu dalam memprediksi atas pendapatan yang akan diperoleh untuk dimasa yang akan datang.

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan data realisasi belanja daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran belanja yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mampu dalam melakukan penghematan atas biaya-biaya yang dikeluarkan.

Menurut (Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja belanja daerah dinilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan dari pajak dan retribusi daerahnya, dimana dengan dilakukan pengukuran ini pemerintah dapat mengevaluasi pekerjaannya dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, menurut (Mardiasmo, 2014), Ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan menggunakan sistem ini, Dispenda dapat memperhitungkan

seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya.

Value For Money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan program kerja sektor publik. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik (Ardila & Putri, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peranan Value For Money untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya penurunan realisasi pendapatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ditahun 2020.
2. Realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pendapatan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini hanya membahas tentang peranan *value for money* untuk mengukur kinerja pemerintahan dengan menggunakan laporan keuangan yang

diukur dari laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, yang dilihat dari ekonomis, efisien dan efektivitas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan konsep *value for money* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan konsep *value for money* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimulai dalam penjelasan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah tersebut meliputi :

- 1) Hak menarik pajak daerah,
- 2) Hak untuk menarik retribusi daerah,
- 3) Hak mengadakan pinjaman, dan
- 4) Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.

Sedangkan kewajiban daerah meliputi :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

- 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menurut (Halim, 2012) mengemukakan bahwa : “Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerinth daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
3. Penerimaan daerah,
4. Pengeluaran daerah,
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum”.

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan tanggungjawab kepada kepala daerah.

2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut (Halim, 2012) mengemukakan bahwa : “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut (Kabo, 2014) mengemukakan bahwa : “Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik”.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang

dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2.1.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pretasi kerja atau pencapaian yang diterima sebuah perusahaan dalam menjalankan program/ kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Menurut (Bastian, 2013), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Menurut (Mardiasmo, 2014) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi sektor public bersifat multi dimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik.” Selain itu, Output yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat intangible, sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2014).

Menurut (Ardila & Putri, 2015) “kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

2.1.2 Value For Money

2.1.2.1 Pengertian Value For Money

Menurut (Mardiasmo, 2014) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut (Bastian, 2013) “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2014). Indikator ekonomi merupakan indikator tentang input. Pertanyaan yang

diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis” (Bastian, 2013).

2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu (Bastian, 2013). Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2014).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2013). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2014).

2.1.2.2 Indikator *Value for Money*

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2014).

Menuurt (Mardiasmo, 2014) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

3. Manfaat Implementasi *Value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2014).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2014).

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat dapat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga dapat terciptanya suatu mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan dari sumber daya yang ekonomis dan efisien.

2.1.2.3 Langkah-langkah pengukuran *Value for Money*

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. (Mardiasmo, 2014) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan input *value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan input *value* adalah realisasi anggaran.

Menurut (Bastian, 2013) mencontohkan suatu biaya atas pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila dapat mencapai *output* sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi untuk sektor publik bila pemerintah melakukan realisasi atas biaya yang jauh dibawah anggaran yang ditetapkan juga tidak begitu baik, hal ini dikarenakan fungsi anggaran digunakan sebagai suatu perencanaan.

Rumus ekonomis redistribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan (Mahsun, 2016) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur antara output dengan input. Semakin besar efisiensi tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Bastian, 2013). (Mardiasmo, 2014) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisien

Persentase	Kriteria
(≤ 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Pengukuran efisiensi tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- d. Menurunkan input (masukan) dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output (keluaran) (Mardiasmo, 2014).

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2014).

Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah menurut (Mardiasmo, 2014) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Hanum, 2011)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam

mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2014) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

2.1.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah

Menurut (Yani, 2011) bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut (Suandy, 2016) pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Menurut (Hanum, 2010) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut (Yani, 2011) yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

4. Lain-lain PAD yang sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari Penjualan aset daerah dan Jasa giro.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
(Marayasa & Jati, 2017)	Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> Untuk Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, dilihat dari rasio ekonomi untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu pada tahun 2012 dan 2013 rasionya sangat ekonomis, tahun 2010 rasionya cukup ekonomis, tahun 2009 dan 2011 rasionya ekonomis. Dilihat dari rasio efisiensi untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sangat efisien. Dilihat dari rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sangat efektif
(Erawan, Santosa, Beny, Budiarta, & Wahyudi, 2018)	Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Hasil penelitian mengungkap bahwa dari hasil observasi yang dilakukan memaparkan mengenai ketimpangan dan penyalahgunaan konsep <i>value for money</i> yang kini memengaruhi kinerja Pemerintahan kabupaten Buleleng.
(Indrayani & Khairunnisa, 2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan konsep Value For Money berdasarkan 3 unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas menunjukkan bahwa: Rasio ekonomi, mendapatkan 86,54%, 82,64% dan 71,43% yang berarti rasio ekonomi adalah di bawah 100% selama tahun 2014-2016 dan hasil rasio ini menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi memperoleh kategori "ekonomis". Rasio efisiensi selama tahun penelitian rasio ini adalah 94,69%, 105,17%

			dan 97,95 %, meskipun pada tahun 2015 rasio tersebut kurang efisien karena dalam persentase di atas 100%. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dikategorikan “efisien”. Sedangkan rasio efektivitas, diperoleh 96,53%, 86,65% dan 76,98%, dimana rasio persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini memperoleh kriteria “tidak efektif”.
(Sari, 2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik
(Purwiyanti, 2017)	Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan fisik irigasi di Kodi Donggala pada tahun 2014 telah: 1) secara ekonomi dengan ekonomi rasio rata-rata di bawah 100%; 2) dilakukan secara efisien dengan efisiensi rata-rata di bawah 100%; 3) efektif dilakukan dengan efektivitas rata-rata 100%.
(Sani, Harahap, Nurlalila, & Nopita, 2019)	<i>Value For Money Time And Legitimation</i>	Variabel : <i>Value For Money</i>	<i>Whereas in the theory of legitimacy revealed that every company or organization must have an assessment that is in line with the norm values of stakeholders or those found in society. Legitimacy can also</i>

			<i>end if it is unable to communicate all actions against masyarakat even though the company or organization has taken actions that are in line with the expectations of the community.</i>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Sinambela & Pohan, 2016)

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan *Value for Money*. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2014)

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat (Sinambela, Saragih, & Sari, 2018). Salah satunya dapat menggunakan *Value for Money*. Pengukuran *Value for Money* dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan

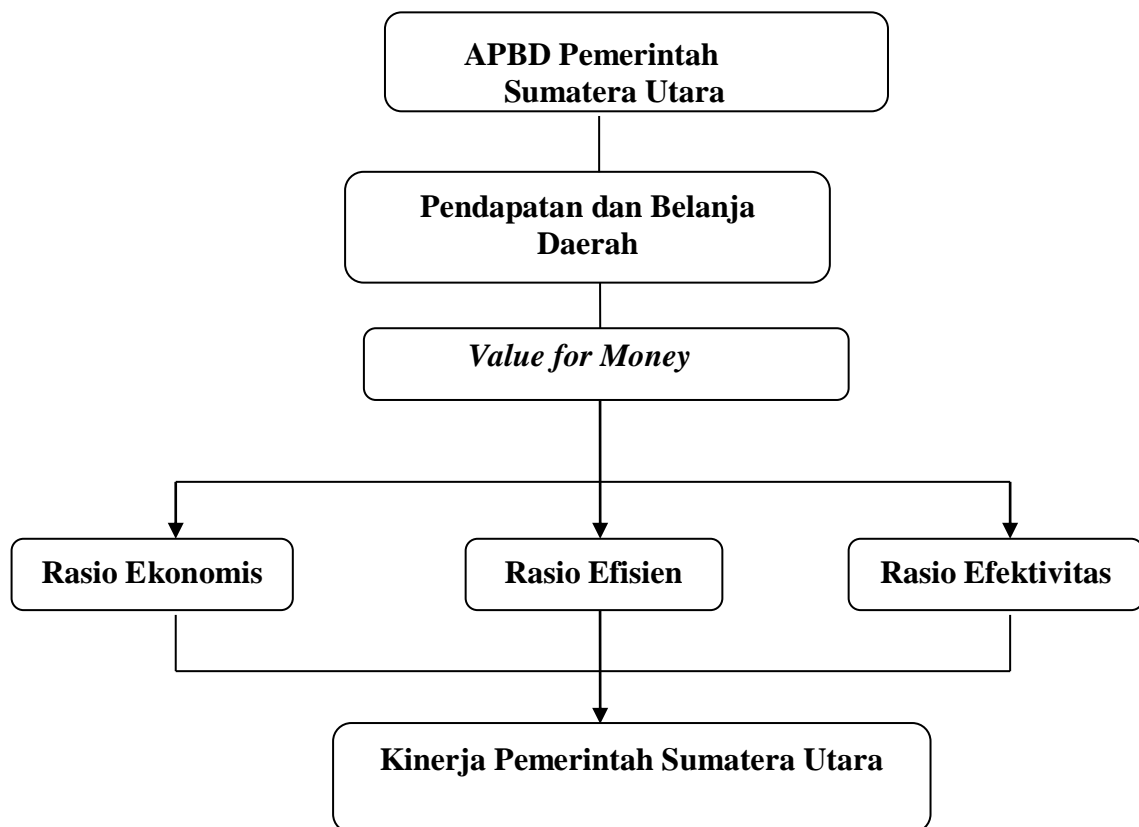
data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Terbatasnya kemampuan pendanaan daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola belanja daerah secara efisien (Siregar, 2019).

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah dikatakan efektif jika persentase pajak dan retribusi daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Indrayani & Khairunnisa, 2018) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio ekonomi, mendapatkan 86,54%, 82,64% dan 71,43% yang berarti rasio ekonomi adalah di bawah 100% selama tahun 2014-2016 dan hasil rasio ini menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi memperoleh kategori “ekonomis”. Rasio efisiensi selama tahun penelitian rasio ini adalah 94,69%, 105,17% dan 97,95 %, meskipun pada tahun 2015 rasio tersebut kurang efisien karena dalam persentase di atas 100%. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dikategorikan “efisien”. Sedangkan rasio

efektivitas, diperoleh 96,53%, 86,65% dan 76,98%, dimana rasio persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini memperoleh kriteria “tidak efektif”.. Dari hasil perhitungan efektivitas, efisiensi, serta ekonomis dapat menggambarkan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintahan Sumatera Utara berupa data-data jumlah anggaran dan realisasi pendapatan belanja daerah sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Jenis Menurut (Nazir, 2011) Jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan (Sugiyono, 2017) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

3.2 Definisi Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat

2. *Value for Money* adalah konsep meliputi penilaian rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas dalam pengukuran kinerjanya, dapat diukur dengan:

- a. Rasio Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dan kemampuan dalam memprediksi pengeluaran di masa yang akan datang, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Yang dapat digunakan dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efisiensi merupakan pengukuran nilai yang dihitung berdasarkan dengan presentase belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efektivitas merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah sesuai dengan jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan. Yang dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agust			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																				
2	Pra Riset					■	■																		
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal																■								
5	Riset																■								
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																						■		

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data ini berupa data yang dihitung berupa data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2016 sampai tahun 2020 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Wawancara

No	Keterangan
1.	Manajemen dalam pengelolaan keuangan
2.	Manajemen dalam pengelolaan pendapatan daerah
3.	Cara meningkatkan kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
4.	ketentuan atau standar dalam penggunaan belanja daerah
5.	Kendala Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan

6.	Solusi Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan
----	---

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung *value for money* berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pendapatan dan belanja daerah Kota Medan dalam enam tahun penelitian.
2. Menganalisis tingkat *value for money* dengan menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pendapatan dan belanja daerah Kota Medan dengan indikator nya antara lain :

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
(\leq 60%)	Sangat Efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup Efisien
(90% - 100%)	Kurang Efisien
(> 100%)	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel 3.5
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

3. Menganalisis dan membahas kinerja *value for money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas Kota Medan.
4. Menarik kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi

Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Luas wilayahnya 72.981 km² . Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan pada tahun 2019 jumlah penduduknya sebesar 14.908.036 jiwa.

Pusat Pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks kresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sistem Pemerintahan Sumatera Utara saat ini di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta perangkat lainnya seperti Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gubernur pada periode ini di duduki oleh Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Edy Rahmayadi dan wakil Gubernur pada periode ini di duduki oleh Bapak Drs. H. Musa Rajekshah, M. Hum. Jumlah satuan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 440 Kecamatan, 693 Kelurahan, 5.419 Desa.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk

Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1.10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13. 937. 797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di Indonesia bagian barat tepatnya di pulau Sumatera dengan ibu Kota Medan. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Serdang Badagai maka diharapkan Provinsi Sumatera Utara mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka nantinya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melakukan pengukuran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan *Value for Money*. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuan pengukuran ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Pengukuran *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), dimana ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur

dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana.

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (spending less) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga input yang sesungguhnya diperlukan.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara output (keluaran) yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Semakin besar output yang dihasilkan dibanding input yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi.

Data input dan output dalam penelitian ini diperoleh dari data Pencapaian Realisasi Keuangan yang terdapat di Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Nilai input didapat dari persentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan nilai output didapat dari persentase pencapaian fisik pada setiap kegiatan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif. Besarnya capaian kinerja dalam penelitian ini diperoleh dari persentase pencapaian fisik kegiatan yang terdapat di Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2 Analisis Data

1. Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

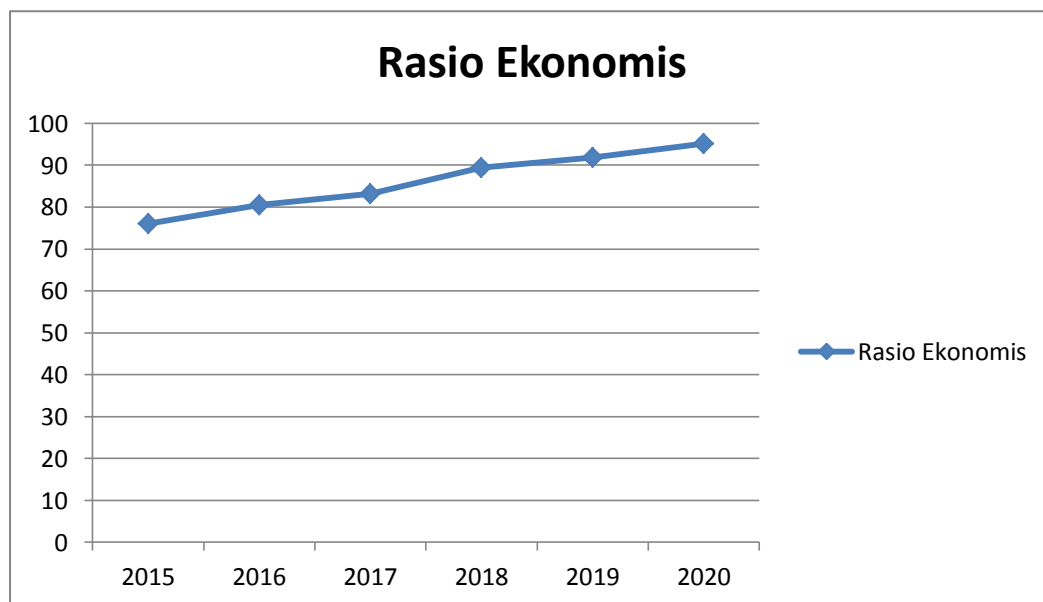
Dalam penelitian ini pengukuran ekonomis dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Pengukuran Rasio Ekonomis
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2015	7.959.167.183.686	8.442.940.440.715	76,09%	60-80%	Kurang Ekonomis
2016	9.476.423.914.544	10.180.753.776.243	80,51%	80-90%	Cukup Ekonomis
2017	10.489.397.363.653	11.434.893.977.763	83,24%	80-90%	Cukup Ekonomis
2018	10.993.656.938.251	12.290.330.450.127	89,45%	80-90%	Cukup Ekonomis
2019	13.527.855.950.251	14.726.662.153.406	91,86%	90-100%	Ekonomis
2020	10.935.643.264.218	11.494.671.486.409	95,13%	90-100%	Ekonomis

Sumber : Data diolah (2022)



Gambar 4.1
Rasio Ekonomis

Dilihat dari tabel 4.1 maka untuk ekonomis pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diukur dalam waktu 6 tahun, dimana untuk tahun 2015 ekonomis sebesar 76,09%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2016

ekonomis mengalami peningkatan menjadi 80,51%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2017 ekonomis mengalami peningkatan menjadi 83,54%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2018 ekonomis mengalami peningkatan menjadi 89,45%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%, ditahun 2019 dan tahun 2020 ekonomis mengalami peningkatan menjadi 91,86% dan 95,13% yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai 100%. Dimana standar dari ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu dalam melakukan penghematan atas belanja daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi untuk tingkat ekonomis atas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara , terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah, dimana realisasi dan anggaran yang dikeluarkan mengalami peningkatan yang nilainya tidak melebihi dari jumlah anggaran belanja, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup mampu dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan yang berdasarkan dari prediksi anggaran yang telah dibuat sebelumnya

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

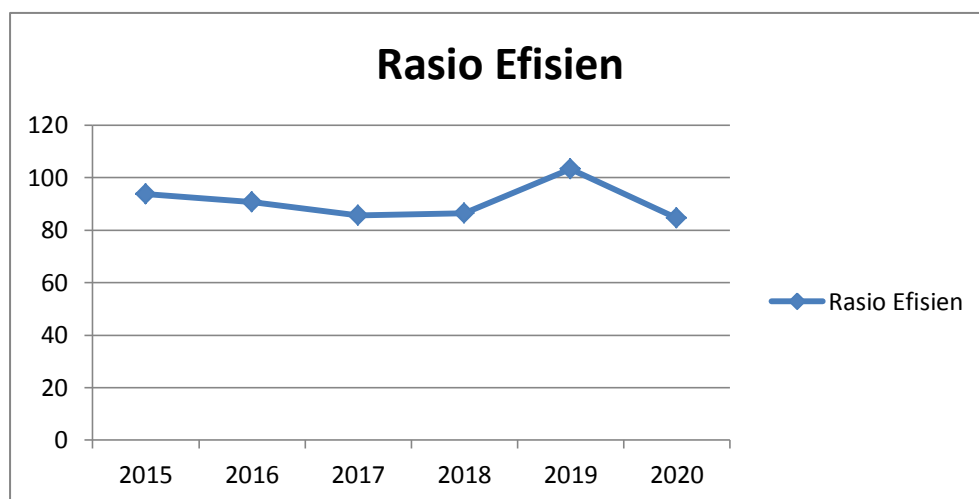
Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Pengukuran Rasio Efisien
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisien	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2015	7.959.167.183.686	8.480.758.952.970	93,85%	(90% - 100%)	Kurang Efisien
2016	9.476.423.914.544	10.440.618.930.401	90,76%	(90% - 100%)	Kurang Efisien
2017	10.489.397.363.653	12.234.837.881.539	85,73%	(80% - 90%)	Cukup Efisien
2018	10.993.656.938.251	12.703.058.587.890	86,54%	(80% - 90%)	Cukup Efisien
2019	13.527.855.950.251	13.081.482.296.509	103,41%	(> 100%)	Tidak Efisien
2020	10.935.643.264.218	12.916.359.750.490	84,66%	(80% - 90%)	Cukup Efisien

Sumber : Data diolah (2022)



Gambar 4.2
Rasio Efisien

Dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas untuk rasio efisiensi pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 93,85% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2016 rasio efisiensi sebesar 90,76% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, ditahun 2017 dan tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 85,73% dan 86,54% yang termasuk dalam kategori cukup efisien karena berada diantara 80% sampai 90%, ditahun 2020 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 103,41 yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2019 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Pengukuran Rasio Efektivitas
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2015	8.452.310.815.631	8.480.758.952.970	100,3%	>100%	Sangat Efektif
2016	10.055.827.824.848	10.440.618.930.401	103,8%	>100%	Sangat Efektif
2017	12.417.425.444.814	12.234.837.881.539	98,53%	90-100%	Efektif
2018	13.037.639.478.554	12.703.058.587.890	97,43%	90-100%	Efektif
2019	14.034.339.344.970	13.081.482.296.509	93,21%	90-100%	Efektif
2020	13.077.362.353.824	10.935.643.264.218	98,77%	90-100%	Efektif

Sumber : Data diolah (2022)



Gambar 4.3
Rasio Eefektivitas

Dapat dilihat dari tabel 4.3 diatas untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif, untuk tahun 2015 dan tahun 2016 rasio eefektivitas sebesar 100,3% dan 103,8% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%, untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 rasio eefektivitas mengalami penurunan menjadi 98,53%, 97,43%, 93,21% dan 96,1% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%. Penurunan yang terjadi untuk rasio eefektivitas disebabkan karena Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara belum mampu dalam mencapai target atas Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan.

Melalui analisis eefektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah

dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah kurang maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

4.2 Pembahasan

Menurut (Mardiasmo, 2014) menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* dapat dilakukan dengan tiga indikator, yaitu menggunakan ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dinas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bila diukur dari *value for money* cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan konsep *value for money* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2015- 2020 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (input) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintahan

Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (output) yang dihasilkan.

Untuk ekonomis Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang diukur untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana peningkatan yang terjadi untuk tingkat ekonomi atas pendapatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, terjadi dikarenakan besarnya jumlah realisasi belanja yang dikeluarkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang juga diikuti dengan anggaran belanja yang dikeluarkan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sudah cukup mampu dalam menekan anggaran atas belanja daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan anggaran atas belanja yang dikeluarkan berdasarkan dari penentuan atas anggaran dari tahun sebelumnya dan melihat dari realisasi atas belanja yang dikeluarkan dari sebelumnya.

Ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik (Mahsun, 2016).

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa ekonomis atas belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk setiap tahunnya cukup mengalami peningkatan bahkan ditahun 2019 dan tahun 2020 berada distandar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup mampu dalam

memprediksi atas belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Pengukuran Efisien

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam menggunakan sumber daya (input) yang tersedia untuk menghasilkan keluaran (output) berupa pelayanan yang diberikan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efisiensi berdasarkan program kerja yang diteliti.

Untuk efisien atas belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diukur untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, dimana peningkatan yang terjadi untuk tingkat efisien terjadi dikarenakan belanja daerah mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan meningkatnya pendapatan daerah, bahkan ditahun 2019 untuk rasio efisien mengalami peningkatan yang melebihi dari standar Kepmendagri No.690.900.327.

Dengan meningkatnya rasio efisiensi ata pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana Pemerintah belum mampu dalam mengefisiensikan belanja daerah, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar serta masih banyak pembangunan yang belum terlaksana pada Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara, selain itu juga pendapatan daerah yang hanya bersumber dari pajak daerah, yaitu PBB, pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir serta pendapatan dari Retribusi Daerah yang dimana luas wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara belum begitu maksimal, hal ini menyebabkan Pendapatan Daerah yang diperoleh tidak mampu dalam mencukupi belanja daerah

Menurut (Mardiasmo, 2014) menyatakan bahwa rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Dari rincian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahkan belanja daerah ditahun 2019 melebihi dari pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan berada diatas Kepmendagri No.690.900.327. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efektivitas berdasarkan program kerja yang diteliti

Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2015 dan tahun 2016 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Rasio efektivitas untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas Kepmendagri No.690.900.327 yaitu 100%. Rasio efektivitas untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih termasuk dalam kategori efektif karena diantara 90 sampai 100% yang sesuai dengan Kepmendagri No.690.900.327. Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana Pemerintah belum mampu dalam mencapai target atas pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kurang maksimal dalam memprediksi atas pendapatan yang akan diperoleh untuk dimasa yang akan datang.

Menurut (Mardiasmo, 2014) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Dari rincian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini terjadi dikarenakan masih dibawahnya realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya anggaran atas pendapatan daerah, dimana menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

2. Faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan

Untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pemerintah daerah, hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak Covid-19 yang berdampak dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana Pemerintah belum mampu dalam mencapai

target atas pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kurang mampu dalam memprediksi atas pendapatan yang akan diperoleh untuk dimasa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2014:110) menyatakan bahwa rasio efektivitas merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Dari rincian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan yang masih dibawah dari anggaran pendapatan terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya anggaran atas pendapatan daerah, dimana menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis **Peranan *Value For Money* untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara** adalah :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan menggunakan *value for money* untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak mencapainya target atas pendapatan Daerah Sumatera Utara, dan juga besarnya anggaran atas belanja daerah, selain itu juga disebabkan dari dampak Covid-19 yang menyerang Indonesia, sehingga berdampak dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah daerah
2. Untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pemerintah daerah, hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak Covid-19 yang berdampak dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Erawan, P. A., Santosa, M. S. W. A., Beny, D. K., Budiarta, & Wahyudi, I. P. T. A. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(3), 187–193.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(1), 1–4.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(2), 1–23.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Kabo, Y. . (2014). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Marayasa, I. M., & Jati, I. K. (2017). Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 788–813.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *e Jurnal Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Sani, U. N., Harahap, S. N., Nurlalila, & Nopita, P. (2019). Value For Money Time And Legitimation. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 55–58.
- Sari, N. C. F. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *jurnal online Universitas Negeri Surabaya*, 1(1), 1-25.
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–18.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi Dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 160–169.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, A. (2011). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2229/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/4/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 5/4/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nani Sekar Wahyuni
NPM : 1605170228
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : terjadinya peningkatan belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah kota medan
- Rencana Judul : 1. Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah kota medan
2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAI AM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
3. PERANAN VALUE FOR MONEY UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintahan Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nani Sekar Wahyuni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2229/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/4/2021

Nama Mahasiswa : Nani Sekar Wahyuni
NPM : 1605170228
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 5/4/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si (04 April 2021)

Judul Disetujui:**)

Peranan value for money untuk mengukur
Piraja Pemerintahan Provinsi Sumatera
Utara.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 08 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

***) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nani Sekar Wahyuni
NPM : 1605170228
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis konsep value for money dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Jelaskan tentang value for money dalam meningkatkan kinerja pemerintahan 2. Jelaskan indikator value for money dan jelaskan standar pengukurannya 3. Jelaskan teori yang mendukung value for money 4. Jelaskan fenomena atau permasalahan yang berhubungan dengan value for money	4 Januari 2022	
Bab 2	1. Jelaskan pengertian pendapatan asli daerah 2. Jelaskan ciri-ciri pajak daerah 3. Jelaskan jenis-jenis pajak daerah	31 Maret 2022	
Bab 3	1. Jelaskan jenis penelitiannya		
Daftar Pustaka	Tambahkan daftar pustaka / <i>Gunakan Medley. Tambahkan sitasi: base ± 5 org.</i>	26 April 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	OK.	30/6-2022	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc. Seminar Proposal	29/6-2022	

Medan, .. 29 Juni 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. (Dr. Julia Hanum, SE., M.Si)

Assoc. Prof. (Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 26 Juli 2022 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
 yang diorganisasikan bahwa :

: Nani Sekar Wahyuni
 : 1605170228
 : Bengkulu, 23 Februari 1996
 : Jln. Gunung Mas No. 7
 : Analisis Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja
 Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Sub I	Fenomena manikelan latar belakang masalah Identifikasi masalah tujuan penelitian batasan masalah teori diuraikan
Sub II	populasi & sampel wawancara
Sub III	Sistematisasi penulisan serta buku pedoman Drip for... Pustaka... dan seminar... 5 jurnal... Dikerjakan
Simpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 26 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 26 Juli 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Nani Sekar Wahyuni
NPM : 1605170228
Tempat / Tgl.Lahir : Bengkulu, 23 Februari 1996
Alamat Rumah : Jln. Gunung Mas No. 7
Judul Proposal : Analisis Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA.*

Medan, 26 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



FEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119

Nomor : 070-1802/BKB P/VI/21
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian (SKP)

Medan, 29 Juni 2021
Kepada.
Yth. Kepala Badan / Kantor
Kesbangpol Kabupaten/ Kota se
Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan birokrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), berikut disampaikan kepada Saudara Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mempedomani Peraturan Dalam Negeri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PIH. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19740330 199402 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 18 Juli 2022

Nomor : 071 / 1290 / SEKR / 2022
Sifat :
Lamp :
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth.
Dekan
Universitas Muhamadyah Sum.Utara
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

di -

Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1930/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 07 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan an. Nani Sekar Wahyuni, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan yang bersangkutan melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data dan wawancara dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,**

Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA/TK.I
NIP. 19720726 199203 1 003



UMSU
Inggit / Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1932/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nani Sekar Wahyuni
N P M : 1605170228
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Assoc.Prof.Dr. Hj. Maya Sari, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Juli 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Dzulhijjah 1443 H
06 Juli 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1930/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 07 Dzulhijjah 1443 H
06 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Gubernur Sumatera Utara C9 BPKAD SUMUT
Jln. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nani Sekar Wahyuni
Npm : 1605170228
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Eks)
Judul Skripsi : Analisis Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Kode Pos 2015 7
M E D A N

Medan, 30 Agustus 2023

Nomor : 000.1.9/1541/SEKR/VIII/2023
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3388/ II.3-AU/ UMSU-05/ F/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang baru kami terima tanggal 29 Agustus 2023, perihal menyelesaikan riset atas nama di bawah ini :

Nama : Nani Senai Wahyuni
NPM : 1605170228
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Konsep Value For Money dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Telah menyelesaikan Riset dan hasil risetnya agar disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,

SUWITO, SE
PEMBINA

NIP. 19720319 199602 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NANI SEKAR WAHYUNI
Tempat /Tgl Lahir : Bengkulu, 23 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Bengkulu Sidodadi
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

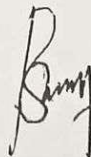
Nama Orang Tua

Ayah : Paiman
Ibu : Supri Hartati
Alamat : Bengkulu Sidodadi

Pendidikan Formal

1. SD 03 Teras Terunjam Medan Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 14 Muko Muko Tamat Tahun 2013
3. SMA Negeri 03 Muko Muko Tamat Tahun 2016
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2023

Medan, Agustus 2023



NANI SEKAR WAHYUNI